

Global Reporting Initiatives, Pelaporan Tanggung Jawab Sosial yang Paripurna

Andilo Tohom Tampubolon
(Widyaiswara Madya pada Pusdiklatwas BPKP)



Bukan saatnya lagi perusahaan berargumentasi bahwa bukan tanggung jawabnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebagaimana diungkapkan oleh Taufik Rahman dalam tulisan berjudul ancaman krisis *energy* dan *corporate sustainability* (Juni 2008), harus ada keseimbangan antara motif ekonomi dan sosial dalam mengelola perusahaan. Keberlanjutan operasi perusahaan bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi bagaimana perusahaan melakukan inisiatif penting membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan (termasuk di dalamnya masyarakat sekitar), menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam dan energi.

Sebagai implementasi dari kewajiban yang tertuang dalam pasal 74 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saat ini sudah banyak perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan terkait tanggung jawab sosialnya. Namun bentuk kegiatan yang dilakukan lebih didominasi pada kegiatan aspek *charity* (sumbangan) dan tidak bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan. Hal ini terlihat dari hasil riset majalah SWA pada tahun 2005 atas 45 buah perusahaan, sebagai berikut:

| | |
|---|--------|
| 1. Program Sosial | |
| a. Pelayanan dan kampanye kesehatan | 17,92% |
| b. Beasiswa pendidikan | 12,26% |
| c. Pembangunan dan renovasi sarana fisik sekolah | 9,43% |
| d. Pembangunan dan renovasi sarana fisik nonsekolah | 8,49% |
| e. Sumbangan sosial untuk bencana alam | 8,49% |
| f. Sekolah Binaan | 4,72% |
| g. Pendidikan dan pelatihan TI | 3,77% |

| | |
|---|--------|
| 2. Program Ekonomi | |
| a. Pemberdayaan dan pembinaan UKM dan pengusaha | 37,75% |
| b. Kemitraan dalam penyediaan kebutuhan bahan baku produksi | 24,53% |
| c. Kredit pembiayaan dan bantuan modal untuk pengembangan usaha | 13,21% |
| d. Pengembangan agrobisnis | 7,55% |
| e. Pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal | 5,66% |
| 3. Program Lingkungan | |
| a. Pembinaan dan kampanye lingkungan | 18,16% |
| b. Pengelolaan lingkungan fisik agar terlihat asri | 16,36% |
| c. Pengelolaan limbah | 10,91% |
| d. Pembangunan sarana bersih | 10,91% |
| e. Penanaman pohon/penghijauan | 9,09% |
| f. Pertanian organic | 7,27% |

Melihat pada kenyataan tersebut sangat sulit kita harapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Integrasi tanggung jawab sosial ke dalam proses bisnis perusahaan harus menjadi agenda yang juga mendesak. Apa dan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dengan ramah lingkungan dan memperhatikan konservasi sumber daya alam harus menjadi prioritas utama sekaligus meningkatkan efisiensi operasinya.

Salah satu sarana yang cukup signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan menggunakan kerangka kerja pelaporan yang dihasilkan oleh *Global Reporting initiatives* (GRI). Dengan kerangka pelaporan ini, perusahaan akan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan terkait tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih komprehensif dan terintegrasi dengan proses bisnis dengan cakupan yang lebih luas dari saat ini dilakukan banyak perusahaan.

Laporan yang lebih dikenal dengan *Sustainability Reporting*, melaporkan kinerja dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Pedoman pelaporannya terdiri dari (1) prinsip dan petunjuk pelaporan; dan (2) pengungkapan standar termasuk indikator kinerja dan hal-hal lain yang harus diungkapkan.

Prinsip dan petunjuk pelaporan GRI adalah mencakup:

- a. Pendefinisian tentang apa yang akan dilaporkan, didasarkan pada materialitas, inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, dan kelengkapan
- b. Kualitas pelaporan yang terdiri dari aspek: keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan
- c. Penentuan batasan pelaporan terkait dengan batasan organisasi yang kinerjanya dilaporkan

Pengungkapan standar menyajikan hal-hal yang harus dilaporkan setelah ditetapkannya isi laporan, yaitu terkait dengan:

- a. Strategi, profil organisasi, dan *governance*
- b. Pendekatan manajemen tentang bagaimana organisasi mengatasi sesuatu topik terkait dengan kinerjanya
- c. Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial

Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja inti dan tambahan yang meliputi kategori ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Indikator inti adalah indikator yang umumnya dapat diterapkan dan dipandang material oleh semua organisasi. Indikator kinerja tambahan adalah indikator yang material buat organisasi tertentu tetapi tidak penting bagi organisasi lainnya.

Indikator kinerja untuk kategori ekonomi meliputi:

- a. kinerja ekonomi, yang menggambarkan kinerja keuangan yang dihasilkan dan dibagikan, implikasi keuangan karena perubahan iklim, cakupan benefit plan, dan bantuan pemerintah
- b. Kehadiran pasar (*Market Presence*), yang menggambarkan rasio upah standar untuk entry level per jenis kelamin terhadap upah minimum regional, proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal, dan proporsi manajer senior yang berasal dari masyarakat lokal,
- c. Dampak ekonomi tidak langsung, yang menggambarkan investasi dan layanan infrastruktur bagi publik dan penjelasan terkait dampak ekonomi tidak langsung

Indikator kinerja untuk kategori lingkungan hidup meliputi:

- a. Bahan baku, yang menggambarkan volume dan berat bahan baku yang digunakan serta prosentasi penggunaan bahan baku daur ulang

- b. Energi, yang menggambarkan konsumsi energi langsung (per energi primer), konsumsi energi tak langsung, penghematan energi dari konservasi dan efisiensi, inisiatif penggunaan produk hemat energi dan energi terbarukan, dan inisiatif pengurangan konsumsi energi tak langsung
- c. Air, yang menggambarkan pengambilan air dan pengaruhnya kepada sumber air, prosentase dan volume penggunaan air daur ulang
- d. Biodiversity, yang menggambarkan kinerja terkait upaya melindungi area dekat lokasi usaha yang memiliki biodiversity yang tinggi
- e. Emisi, gas buang, dan limbah yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam menekan emisi, gas buang, dan limbah termasuk penanganan *spill*
- f. Ketaatan yang diukur dari besarnya denda yang dibayar perusahaan karena pelanggaran aturan terkait lingkungan hidup
- g. Transportasi yang menggambarkan dampak lingkungan hidup dari pengiriman bahan baku dan produk yang dihasilkan

Indikator kinerja untuk kategori sosial meliputi:

- a. Ketenagakerjaan, yang menggambarkan kinerja perekrutan, hubungan dengan buruh/pekerja, keselamatan dan kesehatan pekerja, pendidikan dan pelatihan, peluang yang sejajar, remunerasi wanita dan pria yang sejajar
- b. Hak asasi manusia, yang menggambarkan kinerja kontrak pengadaan/investasi yang memasukkan unsur HAM, upaya perusahaan untuk abolisi pegawai anak-anak, prosentase petugas sekuriti yang dilatih aspek HAM, jumlah insiden dengan penduduk asli, penanganan keluhan terkait HAM
- c. Masyarakat (*society*), yang menggambarkan upaya perusahaan melibatkan masyarakat setempat dan upaya pencegahan atau mitigasi yang diterapkan pada kegiatan berdampak negatif pada masyarakat sekitar, upaya penanganan dan pencegahan tindakan korupsi, dan praktik-praktik anti monopoli/persaingan usaha yang sehat
- d. Tanggung jawab produk, yang mengukur kinerja perusahaan terkait keamanan produk dari aspek kesehatan, pelabelan produk, komunikasi pemasaran (termasuk sponsorship), dan kerahasiaan data pelanggan

Dengan melakukan semua kegiatan terkait ketiga aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial adalah sangat luas dan meliputi seluruh aspek pengelolaan perusahaan, bahkan termasuk kegiatan anti korupsi dan anti monopoli. Kinerja tanggung jawab sosial yang diukur dengan indikator GRI akan

mendorong perusahaan bekerja dalam konteks jangka panjang. Pada gilirannya, hal ini akan mendukung capaian delapan buah target dari *Millenium Development Goals*. Bila target ini dapat tercapai pada tahun 2015, kita bisa yakinkan diri kita bahwa di Indonesia, telah terjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Mampukah kita mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Seperti kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersama kita bisa.